

**TESIS**  
**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTAMBANGAN**  
**DALAM HUBUNGAN DENGAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN**  
**TIMOR TENGAH UTARA.**



**OLEH**  
**YOHANES PEBRIAN VIANNEY MAMBUR (145202152)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS**

Nama : Yohanes Pebrian Vianney Mambur.  
Nomor Mahasiswa : 145202152  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG  
PERTAMBANGAN DALAM HUBUNGAN  
DENGAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN  
TIMOR TENGAH UTARA.**

**Nama Dosen Penguji**

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

**Tanggal**

29/10/15

**Tanda tangan**

Hyronimus Rythi, S.H., LL.M.

29/10/15

25/10/15

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

**Ketua Program Studi**

**Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Yohanes Pebrian Vianney Mambur.  
Nomor Mahasiswa : 145202152  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG  
PERTAMBANGAN DALAM HUBUNGAN DENGAN  
DESENTRALISASI DI KABUPATEN TIMOR  
TENGAH UTARA.**

**Nama Pembimbing**

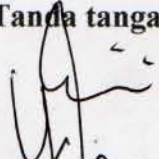
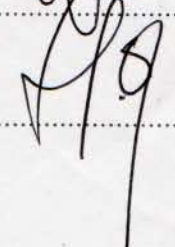
Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Hyronimus Rythi, S.H., LL.M.

**Tanggal**

9 / 15  
/ 10  
11 / 10

**Tanda tangan**


  




## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan tesis ini adalah hasil karya pribadi dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain yang telah ada sebelumnya. Jika penulisan tesis ini terbukti di kemudian hari merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademis atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Oktober 2015



Yohanes Pebrian Vianney Mambur

## INTISARI

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Dalam Hubungan Dengan Desentralisasi Di Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan kebijakan pemerintah daerah dalam hubungan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi dan ekologi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah daerah mampu mensejahterakan rakyat.

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris. Desain disentrailsasi asimetris ini dikarenakan model Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya. Model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda.
2. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Kebijakan pertambangan harus berdasarkan kajian sosiologi ekologi.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah daerah, pertambangan, desentralisasi

## **ABSTRACT**

Research on government policy in the mining sector in relation to decentralization in Regency of Timor Tengah Utara is an empirical research. This research aims to improve government policies in relation to decentralization, so that local governments do not abuse their authority in issuing the policy especially in the mining policy.

This research uses sociological and ecological approach to assist local governments in issuing the policy so that policies can prosper the people .

Results from this research are:

1. To design symmetric decentralization to asymmetric decentralization. The design of asymmetric decentralization is used because a uniform decentralized model ignore the fact that the area has a level of maturity, the coverage area, the potential of the area and population that varies between one and the other. Uniform decentralization model also complicate the region in the developing bureaucratic structures.
2. Make the agricultural sector as a mandatory affairs of government of North Central Timor Regency.
3. Mining policy should be based on the study of sociology ecology

Key words: local government policies, mining, decentralization.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis sanggup merampungkan penulisan tesis dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Dibidang Pertambangan Dalam Hubungan Dengan Desentralisasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penulisan tesis ini dilandasi oleh motivasi dan rasa kecintaan yang kuat untuk membawa masyarakat Kabupaten TTU untuk lebih sejahtera dan makmur melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU yang bijaksana.

Selain hal tersebut, penulisan tesis ini juga untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses perampungan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. E. Sundari S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Widiartana S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing I sebagai sosok dosen yang baik, yang sudah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk membaca, mengoreksi dan melengkapi, serta memberikan arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Hyronimus Rythi S.H., LL.M., selaku Pembimbing II yang karena kebaikan hati, kerendahan hati, dan semangat pelayanannya sudah meluangkan waktu untuk

‘diganggu’, dan selalu menyediakan tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk, mengoreksi dengan teliti, mengarahkan, serta melengkapi kekurangan penulis dalam proses perampungan tesis ini.

4. Dr. W. Riawan Tjandra S.H., M.Hum., selaku penguji tesis ini yang dengan kebaikan dan kerendahan hati selalu mengajarkan penulis bagaimana harus bekerja dengan teliti sehingga kesalahan-kesalahan mendasar dapat diminimalisir.
5. Narasumber-narasumber: terima kasih buat bapak Herry Naif selaku ketua WALHI NTT yang sudah berkenan memberikan penulis beberapa data dan beberapa hasil penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini, terima kasih juga kepada semua anggota WALHI NTT yang sudah membantu penulis dengan caranya masing masing, terima kasih buat kakak Mea Sonbay dan Gusty Fahik yang sudah memberikan beberapa hasil penelitian tentang kasus pertambangan di Kabupaten TTU, dan tidak lupa pula untuk masyarakat Oekopa yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang sudah menyiapkan waktu untuk penulis mewawancarai untuk melengkapi Tesis penulis.
6. Orang tua penulis, Bapak Leonardus Mambur, Dan Mama Kornelia Korsini, yang selalu mengajarkan penulis bagaimana menjadi intelektual yang baik dan pejuang yang tangguh dan ulet, melalui doa, kasih sayang, bimbingan serta dukungan finansial tiada henti walau dalam keterbatasan.
7. Buat adik tercinta Dokter Yohana Rouce Devianey Mambur yang doa-doanya telah membuat penulis selalu dimudahkan setiap urusan dalam proses menyelesaikan tesis ini, dan juga buat Ibu Yosephina Sunira yang sudah membantu penulis dengan doa doanya.
8. Teman-teman Magister Ilmu Hukum angkatan September 2014 sampai Agustus 2015 yang selalu berdiskusi, memberikan kritikan dan masukan yang membuat saya selalu



tercerahkan, kepada ones, alfin, kak yunus dan semua teman yang karena kebersamaan telah membuat penulis belajar banyak hal yang unik.

9. Teman-teman Liga Mahasiswa Pascasarjana Nusa Tenggara Timur, yang melalui diskusi-diskusi intens telah mengajarkan penulis untuk menjadi intelektual yang kritis dan mampu belajar inter-disipliner; kepada teman teman angkatan frater frater Seminari Tinggi Santo Michael dan teman-teman lainnya, melalui canda tawa dan 'main gila' yang kritis membuat saya belajar menjadi pribadi yang peduli akan sesama dan mencintai Nusa Tenggara Timur.



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Tujuan Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>20</b>
A. Kebijakan dalam pemerintahan .....	20
B. Teori Pertambangan.....	22
1. Pengertian Pertambangan .....	22
2. Hukum pertambangan.....	22
C. Kewenangan pengelolaan pertambangan umum .....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>31</b>
A. Jenis penelitian .....	31
B. Pendekatan penelitian .....	31
1. Pendekatan sosiologi dan ekologi.....	31
C. Jenis data.....	33
D. Metode pengumpulan data.....	35
E. Analisis data .....	35
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>40</b>
A. Gambaran umum Provinsi NTT .....	40
B. Letak geografis Kabupaten TTU .....	43
C. Kebijakan dan pertambangan pertimbangan Pemerintah Daerah dibidang pertambangan sehubungan dengan desentralisasi simetris di Kab. TTU .....	50

1. Pengaturan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam Undang Undang .....	50
2. Kebijakan pertambangan oleh Pemerintah Daerah .....	53
3. Kebijakan pertambangan pemerintah daerah Kab. TTU .....	55
a. Analisis persoalan pertambangan di Desa Oekopa Kab. TTU .....	60
b. Hasil temuan Oleh Walhi .....	62
c. Kajian- analisis fakta pertambangan oleh Walhi .....	64
d. Pertambangan Oekopa dalam analsis SWOT oleh Walhi .....	65
4. Solusi bagi kebijakan dibidang pertambangan berkaitan dengan desentralisasi asmetris di Kab. TTU .....	84
a. Desain desentralisasi asmetris .....	85
b. Menjadkan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kab.TTU.....	95
c. Kebijakan pertambangan harus berdasarkan kajian Sosiologi Ekologi.....	98
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran / Rekomendasi .....	112

## DAFTAR PUSTAKA